

JURUS PEMERINTAH JADIKAN PETANI TAK MISKIN

Salah satu janji Presiden RI, Prabowo Subianto, adalah menyejahterakan taraf hidup petani di Indonesia dengan meningkatkan penghasilan mereka. Menurut petani sebagai produsen pangan, harus hidup dengan baik dan layak. Sebab, para petani sebagai tulang punggung bangsa dalam upaya mewujudkan swasembada dan kedaulatan pangan, masih hidup dalam keterbatasan ekonomi, bahkan sebagian besar masih berada di bawah garis kemiskinan. Se jauh ini, petani menghadapi berbagai tantangan, harga pupuk dan sarana produksi pertanian terus naik. Sementara, harga hasil panen justru anjlok saat musim panen raya tiba. Tidak sedikit petani terpaksa menjual hasil tanam mereka dengan harga murah karena harus segera menutup biaya produksi. Ketika harga beras atau cabai melonjak di pasar, keuntungan terbesar bukan diterima petani, melainkan pedagang besar dan tengkulak yang menguasai rantai distribusi. Kondisi tersebut membuat kesejahteraan petani sulit meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sebagian besar penduduk miskin di Indonesia masih berasal dari sektor pertanian, terutama di wilayah pedesaan. Padahal, peran mereka sangat vital dalam menjaga ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk memenuhi janji Presiden Prabowo, pemerintah mengeluarkan berbagai jurus supaya petani hidup layak dan tak miskin.

BACA HAL 11...

LANGKAH PEMERINTAH MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI



Program Pupuk
dan Revitalisasi Industri
Pupuk Nasional



Kebijakan Harga
Gabah yang Lebih
Menguntungkan Petani



Peningkatan
Mekanisasi dan
Modernisasi Pertanian



Reformasi
Birokrasi dan
Deregulasi Pertanian



Pemanfaatan
Teknologi dan
Inovasi Pertanian



Dukungan Kebijakan
Makro dan Stabilitas
Pangan



RI RENCANA BELI JET TEMPUR CHENGDU J-10 ASAL CHINA

Koleksi alutsista armada TNI akan bertambah dengan pembelian jet tempur Chengdu J-10 asal China. Pasalnya, Kementerian Pertahanan (Kemhan) berencana membeli jet tempur tersebut meski belum menyebut berapa jumlahnya. Mabes TNI menyerahkan keputusan pembelian pesawat tersebut ke Kementerian Pertahanan.

“**A**kuisisi pesawat tempur J-10 Chengdu merupakan bagian dari kebijakan pertahanan yang berada di bawah kewenangan dan tanggung jawab Kemhan,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah dilansir Antara, Kamis (16/10/2025).

Menurut Freddy, TNI hanya berperan sebagai operator alat utama sistem senjata (alutsista) yang telah dibeli berdasarkan keputusan dari Kementerian Pertahanan.

Tidak hanya sebagai operator, TNI juga akan mempersiapkan seluruh infrastruktur pendukung seperti alat-alat perawatan, teknisi alutsista hingga pelatihan awak untuk menyambut setiap alutsista baru.

Namun kembali lagi, kata Freddy, semua itu akan dilakukan TNI jika Kementerian Pertahanan sudah dipastikan akan membeli alutsista baru, dalam hal ini J-10 Chengdu. “Seluruhnya tetap mengacu pada keputusan dan arahan Kementerian Pertahanan,” jelas Freddy.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengaku belum mengetahui detail anggaran pembelian pesawat jet tempur Chengdu J-10 buatan China oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan). Namun, dia telah mengabulkan permintaan anggaran senilai 9 miliar dolar Amerika Serikat (AS) oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsuddin. Akan tetapi Menkeu tak bisa memastikan anggaran tersebut untuk membeli pesawat jet tempur J-10.

“Kalau untuk yang tahun depan, sudah kami setuju. Ini (pembelian pesawat jet tempur J-10) nggak tahu pakai yang mana,” ujar Purbaya, di Jakarta, dilansir antara Rabu (16/10/2025).

Purbaya menyatakan bakal memverifikasi ulang pembelian pesawat jet tempur Chengdu J-10, termasuk soal rencana impor pesawat buatan China itu.

“Saya nggak tahu ini baru lagi atau nggak. Harus sih yang disebutkan sudah masuk yang dianggarkan. Tapi saya harus double check lagi, apa dia mau impor tahun depannya lagi atau



Indonesia akan membeli jet tempur Chengdu J-10 asal China.

kapen. Tapi yang dia (Menhan) minta selama ini sudah kami penuhi,” ujarnya pula.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsuddin menyebutkan pesawat tempur Chengdu J-10 buatan China akan segera terbang di Jakarta. Namun, Sjafrie tidak mengungkapkan lebih lanjut detail waktu penerbangan jet tempur tersebut.

Terpisah, Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, pesawat tempur Chengdu J-10 buatan China yang ingin dibeli Kemhan masih dikaji oleh TNI AU.

“Sementara untuk yang J-10 itu memang menjadi pengkajian TNI AU, kita ingin platform-platform alutsista yang terbaik,” kata dia, Kamis (18/9/2025).

Kajian tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian pembelian jet tempur J-10 dalam memperkuat sistem pertahanan udara nasional. Frega menambahkan, hingga kini Kemhan belum membahas besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk pembelian tersebut.

Sebelumnya, beredar informasi di media sosial bahwa pemerintah berencana membeli 42 unit pesawat jet tempur Chengdu J-10. Kabar ini juga sempat dimuat oleh akun Instagram @isds.indonesia pada 2 September 2025.

Dalam unggahan tersebut

disebutkan bahwa kontrak pembelian J-10 sempat tertunda karena persoalan pendanaan, namun kini akan dilanjutkan dengan skema pembayaran dari pihak China.

Selain rencana pembelian J-10, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono menyampaikan bahwa tiga unit pesawat tempur Rafale buatan Prancis dijadwalkan tiba di Indonesia pada Februari atau Maret 2026.

“Kita akan menerima batch pertama tiga pesawat dahulu,” kata Marsekal Tonny di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (13/9/2025) dilansir beritasatu.

Menurut Tonny, kedatangan Rafale akan memperkuat jajaran pertahanan udara TNI AU yang saat ini sudah diperkuat dengan armada pesawat tempur seperti T-50, Hawk 100/200, Sukhoi Su-30, dan F-16.

Seperti apa Jet Tempur Chengdu J-10?

Chengdu J-10 'Vigorous Dragon' adalah pesawat tempur multiperan ringan buatan China, yang secara kasar setara dengan F-16 Amerika dan Saab Gripen. J-10 bermesin tunggal yang dikembangkan oleh Avic Chengdu Aircraft Co Ltd. Pesawat tersebut beraksi dalam konflik baru-baru ini antara Pakistan dan India.

Pengembangan J-10 dimulai pada



Akuisisi pesawat tempur J-10 Chengdu merupakan bagian dari kebijakan pertahanan yang berada di bawah kewenangan dan tanggung jawab Kemhan,”

FREDDY ARDIANZAH

Kepala Pusat Penerangan
Mabes TNI Mayjen TNI (Mar)

1988, dengan prototipe pertama terbang pada 1996, dan produksi direncanakan dimulai pada 2005. Dalam perkembangannya, sudah banyak varian J-10 yang sudah dihasilkan. Mereka di antaranya adalah J-10A; J-10AH; J-10S; J-10SH; J-10B; J-10B TVC Demonstrator; J-10C; dan J-10CE. Adapun, ciri-ciri umum dari J-10 adalah memiliki panjang 16,9 meter; memiliki rentang sayap 11,3 meter; dengan tinggi 5,7 meter; dan luas sayap 45,5 m².

Varian J-10 pada awalnya dilengkapi dengan radar pulse-doppler (PD) tipe 1473 yang dikembangkan oleh Institut ke-14 CETC; Tipe 1473 telah disebut radar sukses atau praktis pertama di China. Sementara, J-10B dilengkapi dengan radar dengan jenis active electronically scanned array (AESA) atau passive electronically scanned array (PESA), dikutip Bloomberg Technoz.

Pemerintah Indonesia sempat mengatakan China telah menawarkan untuk menjual jet J-10. Pemerintah sedang memeriksa apakah pesawat yang banyak digunakan oleh angkatan udara China memenuhi persyaratan operasional dan dapat diintegrasikan ke dalam sistem Indonesia yang ada, kata Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto selama diskusi publik di Jakarta pada Juni 2025. (han,ant,ist/lut)

DPR DAN MPR DUKUNG ADANYA DITJEN PESANTREN

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Janurattmoko, dan Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII, DPR RI Hidayat Nur Wahid, mendukung peningkatan status Direktorat Pesantren Kementerian Agama menjadi Direktorat Jenderal (Ditjen) guna memperkuat kewenangan dan kapasitas kelembagaan dalam membina pesantren di seluruh Indonesia.

Kebudayaan Ditjen Pesantren akan memberikan posisi yang lebih setara bagi lembaga pendidikan Islam. Sehingga Pemerintah lebih kuat lagi dalam perhatian ke Pesantren sebagai lembaga Pendidikan formal yang khas Indonesia dan sudah sangat banyak berjasa bagi Indonesia. Dengan demikian, program bantuan, pelatihan, serta audit teknis bangunan dapat tersalurkan dengan lebih efektif.

"Kalau ada Ditjen khusus, setiap pesantren bisa mendapat akses langsung ke tenaga ahli, inspeksi bangunan, hingga dana perbaikan yang transparan dan tepat sasaran," kata Singgih di Jakarta, Kamis (16/10/2025) dilansir antara.

Wacana pembentukan Ditjen Pesantren tersebut muncul setelah peristiwa runtuhnya salah satu gedung di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny. Kejadian tersebut menyita perhatian publik dan memunculkan wacana pembentukan Direktorat Jenderal khusus yang menangani pesantren di bawah Kementerian Agama.

"Di Indonesia ada sekitar 5 juta santri dan lebih dari 42 ribu pondok pesantren aktif. Jika menjadi Ditjen, lembaga ini akan lebih berdaya dalam melindungi, membina, dan memajukan pesantren," ujarnya.

Menurut Singgih, tragedi robohnya bangunan Ponpes Al Khoziny menjadi peringatan akan kerentanan tata kelola dan infrastruktur pesantren. Dia menekankan perlunya peningkatan kualitas, standar bangunan, dan pengawasan teknis agar peristiwa serupa tidak terulang.

"Pesantren memiliki akar sejarah yang kuat dan menjadi benteng pembentukan karakter bangsa. Negara harus hadir memberi dukungan nyata," kata Singgih.

Singgih menyoroti pula ketimpangan penyaluran dana untuk pesantren, terutama dari Dana Abadi Pesantren yang dikelola bersama LPDP. Menurutnya, dana tersebut selama ini lebih banyak difokuskan pada beasiswa, sedangkan bantuan untuk pembangunan fisik dan

rehabilitasi masih sangat kecil dibandingkan kebutuhan.

Lebih lanjut, Singgih mengungkapkan bahwa imbal hasil Dana Abadi Pendidikan dan Pesantren pada 2023 mencapai Rp9,3 triliun, namun hanya sekitar Rp250 miliar yang disalurkan ke pesantren. Padahal idealnya, kata dia, Rp900 miliar perlu dialokasikan untuk 5 juta santri agar manfaatnya lebih luas, tidak hanya untuk beasiswa, tetapi juga pembangunan dan pemeliharaan fasilitas.

Selain aspek kelembagaan dan pendanaan, Singgih menilai penguatan SDM pesantren juga sangat mendesak. Dia mengingatkan, pesantren merupakan wajah asli pendidikan Islam di Indonesia yang telah berperan besar dalam mencerdaskan bangsa dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Namun, perhatian pemerintah terhadapnya masih belum seimbang.

"Masih banyak pesantren yang dikelola secara swadaya dengan fasilitas terbatas, teknologi minim, dan guru yang belum tersertifikasi. Data Balitbang Kemenag mencatat lebih dari 60 persen guru di pesantren belum bergelar sarjana. Ini bukan soal kemampuan, tapi soal akses pendidikan yang belum merata," jelasnya.

Singgih menegaskan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sudah memberikan dasar hukum kuat bagi negara untuk mendukung pesantren dalam pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, implementasinya masih berjalan lambat.

"Pembentukan Ditjen Pondok Pesantren tidak akan menambah beban Kementerian Agama, karena urusan haji kini sudah ditangani Kementerian Haji. Justru dengan Ditjen ini, pembinaan pesantren akan lebih fokus dan efektif," tuturnya.

Sementara itu, Hidayat Nur Wahid mengatakan dukungan peningkatan status Direktorat Pesantren menjadi Direktorat Jenderal Pesantren agar Pemerintah lebih kuat lagi dalam perhatian ke Pesantren sebagai lembaga Pendidikan formal yang khas Indonesia dan sudah sangat banyak



Para santri di Pesantren.

berjasa bagi Indonesia.

"Pesantren merupakan institusi menjejajah yang berjasa bagi perjuangan bangsa dan berperan besar membantu negara melaksanakan kewajiban konstitusionalnya, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu pada prinsipnya dan sesuai dengan konstitusi, Pemerintah harusnya memberikan dukungan, baik melalui regulasi, pendampingan, bantuan via APBN atau manfaat Dana Abadi Pesantren yang juga bersumber dari APBN," katanya dilansir suara islam Rabu (15/10/2025).

"Bahkan sejak lama saya mendorong agar antara lain untuk keperluan di atas penting dibentuk Ditjen Pesantren sehingga lebih banyak lagi bantuan, program, dan pendampingan terhadap Pesantren di Indonesia yang sebagiannya sudah berusia tua," lanjutnya.

Dia menjelaskan selama ini APBN memang sudah digunakan untuk pembangunan ruang kelas baru ataupun rehabilitasi di lingkungan lembaga pendidikan umum maupun keagamaan seperti Madrasah dan Pesantren, baik melalui program Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama maupun Kementerian PU. Namun, anggaran yang disalurkan untuk Madrasah apalagi Pesantren, belum adil dan belum sebanding dengan jumlah Pesantren yang ada, sehingga dibutuhkan dukungan anggaran lain seperti berasal dari Dana Abadi Pesantren.

"Sayangnya hingga saat ini Pesantren belum benar-benar merasakan manfaat dari Dana Abadi Pesantren tersebut, karena program yang disalurkan baru berbentuk beasiswa, dengan alokasi dana yang juga jauh dari optimal dan proporsional," terang Anggota DPR RI Fraksi PKS ini.

Saat ini Dana Abadi Pesantren masih digabung dengan Dana Abadi Pendidikan dengan dikelola LPDP. Dari perolehan imbal hasil LPDP Rp9,3 Triliun di tahun 2023 misalnya, alokasi untuk Pesantren hanya Rp250 Miliar. Padahal, jumlah santri Pesantren sekitar lima juta santri atau setara

dengan sekitar sembilan persen siswa nasional yang mencapai 52 juta siswa.

"Sehingga sudah selayaknya alokasi manfaat Dana Abadi Pesantren mengikuti proporsi jumlah santri dengan siswa tersebut, yakni bisa disalurkan sekitar Rp 900 Miliar untuk Pesantren. Dan pada nominal tersebut sudah sewajarnya selain dikerjakan oleh lembaga selevel Direktorat Jenderal yakni Ditjen Pesantren, tidak hanya direktur saja, juga agar peruntukannya mencakup beasiswa dan pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan, untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan rasa aman Santri," lanjut Hidayat. (han,ant,ist/lut)



Kalau ada Ditjen khusus, setiap pesantren bisa mendapat akses langsung ke tenaga ahli, inspeksi bangunan, hingga dana perbaikan yang transparan dan tepat sasaran,"

**SINGGIH
JANURATMOK**
Wakil Ketua Komisi VIII
DPR RI

LUHUT SAHUT PURBAYA SOAL UTANG WHOOSH DAN FAMILY OFFICE: SIAPA MINTA APBN?

Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DENas), Luhut Binsar Pandjaitan, menyahut Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa soal utang proyek Whoosh dan family office. Luhut menegaskan tidak ada permintaan dana sedikit pun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) dan program Family Office yang sedang disiapkan pemerintah menjadi sorotan publik usai Menkeu Purbaya mengaku ogah membiayai.

Dalam forum ekonomi bertajuk "1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Optimism on 8% Economic Growth" di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025), Luhut menegaskan bahwa tidak ada satu rupiah pun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk menutup utang proyek Whoosh.

"Kita ini suka ribut sendiri soal Whoosh. Masalahnya sederhana, tinggal restrukturisasi saja. Siapa yang minta APBN? Gak ada. Saya sudah bicara langsung dengan pihak China karena sejak awal saya ikut mengerjakannya," tegas Luhut di hadapan peserta forum.

Menurutnya, pemerintah saat ini tengah menyiapkan restrukturisasi pembiayaan proyek yang digarap oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) itu. Langkah ini dilakukan bersama Danantara, lembaga investasi negara yang kini menaungi sejumlah BUMN strategis.

Luhut menjelaskan, proses restrukturisasi tinggal menunggu terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) yang akan membentuk tim khusus untuk menangani negosiasi dengan China. Tim ini nantinya akan berkoordinasi dengan CEO Danantara, Rosan Roeslani, untuk mencari skema pelunasan yang paling efisien.

"Saya sudah bicara dengan Pak Rosan supaya proses ini berlanjut. Setelah Keppres keluar, tim langsung bekerja untuk negosiasi. Kita lihat nanti apakah bisa dicicil lewat dividen BUMN, seperti skema di proyek LRT," ungkapnya.

Meski memastikan APBN tak digunakan, Luhut tak menampik bahwa dukungan pemerintah dalam bentuk subsidi tetap dibutuhkan. Menurutnya, transportasi publik di mana pun di dunia tidak pernah benar-benar menguntungkan tanpa subsidi.

"Tidak ada transportasi publik yang profit murni. Semua dapat subsidi, tapi harus terukur dan efisien," ujarnya.

Rute ke Surabaya

Luhut juga mengungkapkan bahwa pemerintah sudah memulai



Luhut Binsar Pandjaitan dalam forum ekonomi bertajuk "1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Optimism on 8% Economic Growth" di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).ist

kajian awal (preliminary study) untuk memperpanjang jalur kereta cepat hingga Surabaya. Rute tersebut akan melewati Bandung, Kertajati, Purworejo, Cilacap, Solo, hingga Surabaya.

Ia menekankan agar proyek

lanjutan ini tak mengulang kesalahan masa lalu, seperti banyaknya pembangunan terowongan yang menyebabkan biaya membengkak.

"Pelajaran dari Jakarta-Bandung, jangan banyak tunnel karena mahal. Tanah juga jangan banyak dibebaskan,

cukup sejajar dengan jalur kereta atau jalan yang sudah ada," jelasnya.

Sebagai informasi, proyek Whoosh menelan biaya sekitar USD 7,27 miliar atau setara Rp120 triliun dengan pembengkakan biaya (cost overrun) mencapai USD 1,2 miliar. Sementara PT KAI menanggung utang Rp6,9 triliun kepada China Development Bank (CDB) untuk menutupi selisih biaya tersebut.(tin,kum,rls/dya)

FAKTA DAN DATA UTANG PROYEK KERETA CEPAT WHOOSH

UTANG & STRUKTUR PEMBIAYAAN

- Nilai utang proyek Whoosh mencapai ± Rp 116 triliun (sekitar 7,2 miliar USD) — beban besar bagi konsorsium BUMN dan investor China.
- Proyek mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sekitar 1,2 miliar USD atau ± Rp 19,5 triliun.
- Sekitar 75 % pembiayaan proyek diperoleh melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB), sementara sisanya (25 %) melalui ekuitas/pinjaman internal konsorsium.
- Skema pinjaman CDB termasuk tenor panjang (40 tahun) dan bunga tetap sekitar 2 % per tahun.

STRUKTUR KEPEMILIKAN PROYEK

- Konsorsium Indonesia melalui Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) memegang sekitar 60 % saham.
- Konsorsium China (China Railway / Beijing Yawan HSR Co. Ltd.) memegang 40 % saham.
- Di dalam PSBI, kepemilikan saham dibagi antara KAI, WIKA, Jasa Marga, dan PTPN VIII. (KAI menjadi pemegang saham utama)



miliar dari target awal biaya proyek sebesar US\$6 miliar. Sebanyak 60% dari pembengkakan biaya atau sekitar US\$720 juta akan dibayarkan oleh konsorsium dari Indonesia, sedangkan 40% sisanya atau sekitar US\$480 juta ditanggung oleh konsorsium China.(wid,rls,ist/dya)

Kekhawatiran Mahfud MD: China Minta Wilayah Natuna Utara

MENTERI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Periode 2019—2024 Mahfud MD mewanti-wanti pemerintah Indonesia soal risiko kehilangan wilayah Natuna Utara jika gagal membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ke China.

Mahfud menilai sikap Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sudah tepat yakni menolak pembayaran utang proyek kereta cepat alias Whoosh oleh Pemerintah melalui APBN. "Dan tidak mau bayar [Menkeu] Purbaya. Menurut saya benar [sikap] Purbaya," ujarnya dari sinjar di Youtube pribadinya @Mahfud MD Official, dikutip Kamis (16/10/2025).

Meskipun demikian, dia mewanti-wanti risiko gagal bayar utang Whoosh yang dapat merugikan negara. Menurutnya, jika Indonesia gagal membayar utang Kereta Cepat, China berpeluang meminta kompensasi yang sangat merugikan Indonesia.

"Misalnya kita gagal bayar, itu

berarti China harus ambil tuh [asset Whoosh] tapi kan tidak mungkin karena di tengah kota. Pasti dia minta kompensasi ke samping, misalnya Natuna Utara," ujarnya.

Peluang ke arah sana, kata Mahfud, sangat besar karena diketahui Natuna Utara berdekatan dengan wilayah konflik perairan laut tempat China dan beberapa negara di sekitarnya berkonflik.

Risiko itu disampaikan Mahfud dengan berkaca pada kasus serupa di Sri Lanka. Di negara tersebut, sambungnya, pernah gagal bayar utang proyek pelabuhan yang kemudian diambil alih oleh China sampai sekarang.

"Kalau merambah ke daerah kita yang tidak masuk konflik di Natuna Utara misalnya, lalu membangun pangkalan [militer] di sana, mau diapakan? Itu masalahnya," jelasnya.

Adapun, berdasarkan catatan, Whoosh telah menelan biaya investasi hingga US\$7,2 miliar. Nilai investasi tersebut mengalami pembengkakan biaya sebesar US\$1,2

KEBAKARAN DISERTAI LEDAKAN GUNCANG KILANG TUBAN, WARGA MENGUNGSI KE PANTAI

Suara ledakan terdengar dari area kilang minyak dan petrokimia milik PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, pada Kamis (16/10/2025) sekitar pukul 12.00 WIB. Peristiwa itu memicu kepanikan warga di sekitar lokasi, yang bergegas keluar rumah untuk menyelamatkan diri.

Kepulan asap hitam tebal membubung tinggi sesaat setelah ledakan terjadi. Kondisi yang dinilai membahayakan itu memaksa sejumlah warga berlarian mengungsi ke Pantai Panduri dan balai desa Remen. Mereka khawatir paparan asap mengandung bahan berbahaya.

Langkah ini disebut menjadi tindak l'Kami takut karena ini perusahaan kimia. Tidak ada imbauan dari perusahaan," tambah Hanafi (51), warga yang menyaksikan kejadian tersebut. Ia juga menyesalkan sistem alarm perusahaan yang dinilai lambat berbunyi.

Sementara warga lain menggambarkan kondisi saat ledakan terjadi. "Suaranya keras sekali. Awalnya kecil, lalu api membesar dan asapnya pekat," ujar Kamtomo, warga lain.

Kepala Desa Tasikharjo, Damuri, mengaku menerima laporan kebakaran dari anaknya dan segera menghubungi pihak perusahaan, namun tidak mendapat respons. "Saya hubungi semua nomor darurat TPPI, tapi tidak diangkat. Akhirnya saya pakai pengeras suara masjid untuk minta warga evakuasi," ujarnya.

Menurutnya, meski tidak ada korban jiwa, insiden ini meninggalkan trauma mendalam bagi warga. "Anak-anak sekolah dipulangkan, langit gelap oleh asap. Warga ketakutan," kata Damuri.

Ia menambahkan, peristiwa serupa bukan kali pertama terjadi di kilang tersebut. Warga sebelumnya sudah meminta relokasi permukiman karena khawatir terhadap kebocoran gas dan polusi dari pabrik, namun belum ada tindak lanjut nyata dari pihak perusahaan.

"Setelah kejadian ini, kami akan mengirim surat resmi ke DPRD Tuban, Bupati, dan Kementerian Perindustrian. Kami menuntut dialog terbuka dengan pihak TPPI demi keselamatan warga," tegasnya.

Sekitar 40 menit setelah ledakan, petugas berhasil mengendalikan api, meski asap hitam masih tampak di udara.

Diketahui, TPPI merupakan perusahaan pengolah minyak bumi dan petrokimia yang menghasilkan produk aromatik seperti paraxylene, benzene, orthoxylene, toluene, serta bahan bakar bensin RON 88 dan 92,



Gumpalan asap hitam akibat kebakaran di kilang TPPIlist

solar, dan LPG. Kilang ini mulai beroperasi komersial pada 1 Agustus 2006, dengan kapasitas produksi hingga 100.000 barel kondensat atau naphta per hari.

Dalam beberapa tahun terakhir,

setidaknya dua kejadian sempat mengguncang kawasan industri strategis ini.

Peristiwa pertama terjadi pada 10 Agustus 2019. Saat itu, api tiba-tiba muncul dari salah satu pipa di unit

aromatik yang memproduksi benzene, toluene, dan xylene (BTX). Asap tipis sempat terlihat dari kejauhan, memicu kekhawatiran warga sekitar. Namun, berkat kesigapan tim pemadam internal, kobaran api berhasil dikendalikan dalam waktu singkat. Tidak ada korban jiwa maupun kerusakan besar yang dilaporkan.

Dugaan sementara mengarah pada kebocoran pipa di sistem produksi aromatik. Insiden ini terjadi ketika kilang sedang menjalani tahap optimalisasi produksi, setelah beberapa tahun vakum dari aktivitas penuh. (tin,ist,kcm/dya)

TPPI Tuban Pastikan Tak Beracun dan Pasokan Aman

KEBAKARAN yang terjadi di salah satu unit PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dipastikan tidak menimbulkan dampak beracun bagi masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan oleh Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) Manager PT TPPI Tuban, Darmanto.

Ia mengatakan, bahwa berdasarkan hasil pengecekan kualitas udara di sekitar area pabrik menunjukkan angka tak melebihi indeks 50, yang artinya masih dinyatakan aman dan tidak berdampak bagi masyarakat.

"Asap hitam yang sempat terlihat sudah terbawa angin dan tidak beracun. Hasil pengecekan kualitas udara di area perusahaan semuanya di bawah angka 50," ujarnya.

Soal permintaan masyarakat terkait pemeriksaan kesehatan, Darmanto menegaskan, tidak akan dilakukan tes kesehatan massal karena tidak ada efek atau dampak dari kebakaran itu.

"Karena tidak ada efek dari insiden ini, jadi tidak dilakukan tes

kesehatan," pungkasnya.

Insiden kebakaran itu diawali dengan suara ledakan keras yang disusul kepulan asap hitam tebal membubung tinggi dari dalam kawasan pabrik. Dengan langkah cepat penanganan dan hasil pemantauan udara yang aman, TPPI memastikan insiden tersebut tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitar.

Terpisah, Area Manager CSR & Comrell PT TPPI, Tinoto Hadi Sucipto menjelaskan, kejadian tersebut disebabkan oleh gangguan pada salah satu peralatan kilang yang menimbulkan asap, namun tidak sampai terjadi ledakan seperti kabar yang beredar.

"Memang ada insiden pada peralatan kami yang menyebabkan munculnya asap, tetapi tidak ada ledakan dan kondisi secara umum aman. Tim tanggap darurat kami langsung bergerak cepat dan berhasil menanganinya dalam waktu sekitar 30-40 menit," ujar Tinoto.

Tinoto menambahkan, setelah

Jejak Kejadian Serupa di Kilang TPPI Tuban

○ Kebakaran Unit Aromatik (2019)

- Waktu: 10 Agustus 2019
- Lokasi: Area BTX, Desa Remen, Jenu
- Kronologi: Api muncul dari pipa di unit aromatik
- Dampak: Cepat dipadamkan, tanpa korban
- Penyebab: Diduga kebocoran pipa saat optimalisasi produksi

○ Ledakan Area TPPI (2021)

- Waktu: 15 November 2021
- Kronologi: Dua ledakan terdengar, muncul asap tebal
- Penjelasan: "Flaring" normal saat perawatan, bukan ledakan berbahaya
- Dampak: Tanpa korban, warga sempat panik



penanganan kebakaran selesai, kilang TPPI di Tuban kembali beroperasi secara normal dan pasokan bahan bakar minyak (BBM) tidak mengalami gangguan maupun kendala. "Pasokan BBM aman, tidak ada gangguan distribusi akibat insiden ini," tuturnya.

Lebih lanjut, Tinoto menegaskan bahwa tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam insiden tersebut. "Alhamdulillah aman, tidak ada yang luka," ucapnya. (wid,ist,rls/dya)

Beroperasi November, Pemkot Malang Siapkan Feeder Transjatim Pakai Dana BTT



Salah satu armada angkutan kota di Terminal Landungsari, Kota Malang. (Santi/Lentera)

Tahun Anggaran 2025.

"Kemarin Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) provinsi datang menemui saya, menyampaikan ada beberapa jalur-jalur yang akan dilewati. Inshaallah Transjatim akan beroperasi akhir November tahun ini," ujar Wahyu, Kamis (16/10/2025).

Wahyu menjelaskan untuk tahap awal, pembiayaan feeder Transjatim akan diambil dari dana BTT Tahun Anggaran 2025. Kebijakan ini dilakukan agar pelaksanaan feeder dapat segera dilakukan tanpa penganggaran melalui APBD 2026.

Menurutnya, penggunaan dana BTT diprioritaskan untuk kebutuhan paling mendesak. Agar operasional Transjatim dapat berjalan sesuai jadwal. Ia memastikan perencanaan penggunaan dana tersebut tetap melalui perhitungan dan tahapan administrasi yang sesuai aturan.

"Feeder itu butuh anggaran, dan masih kami hitung. Di awal ini kami gunakan BTT untuk yang paling prioritas, mana dulu yang harus dijalankan. Tahun depan baru kami anggarkan lewat APBD," jelasnya.

"Saya juga sudah sampaikan ke driver angkot dan paguyubannya. Kami akan bantu untuk kesejahteraan. Buktinya, mereka menerima dan mendukung, tapi tetap berharap agar nasib angkot diperhatikan," imbuhnya.

Wahyu menegaskan, pelibatan sopir angkot tidak hanya bersifat simbolik. Dalam skema yang dirancang bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, para sopir angkot akan dilibatkan secara langsung sebagai tenaga teknis di Transjatim, termasuk sopir dan teknisi mesin.

"Jumlahnya 15 armada, termasuk satu cadangan. Jadi mereka akan bergantian. Harapan kami mereka bisa diterima," kata Wahyu.

Pria yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, ini mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari arahan Gubernur Jawa Timur agar

pelaksanaan Transjatim juga memperhatikan kesejahteraan para sopir angkot di daerah.

Pasalnya, dalam pemberitaan sebelumnya, paguyuban sopir angkot sempat menyampaikan penolakan terhadap rencana pelaksanaan Transjatim dan mengadu ke DPRD Kota Malang.

Namun, Wahyu menyebut komunikasi yang intens antara pemerintah dan perwakilan sopir kini menghasilkan kesepahaman baru.

Lebih lanjut, Wahyu menambahkan, Transjatim di Malang Raya akan memiliki empat koridor, namun pada tahap awal hanya satu koridor yang akan beroperasi. Dalam satu koridor tersebut, terdapat 15 unit armada, termasuk satu unit cadangan yang akan beroperasi secara bergantian.

"Semua rute Transjatim nanti sudah melalui area perkantoran, pendidikan, dan titik-titik aktivitas masyarakat. Jadi harapannya bisa memberikan rasa nyaman kepada penumpang dan mengurangi kemacetan di Kota Malang," pungkash Wahyu. (Santi/Dya)

MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memastikan operasional Transjatim di wilayahnya akan dimulai pada akhir November 2025.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan langkah awal pelaksanaan layanan transportasi tersebut akan didukung dengan penganggaran feeder menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT)

Akhir 2025 Kabupaten Malang Bakal Miliki 119 Industri Hasil Tembakau

MALANG - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Malang memproyeksikan jumlah industri hasil tembakau (IHT) di wilayahnya akan terus meningkat.

Jika saat ini tercatat ada 114 IHT yang beroperasi, jumlah tersebut diperkirakan akan bertambah menjadi sekitar 119 unit pada akhir tahun 2025 nanti.

"Industri hasil tembakau di Kabupaten Malang saat ini ada 114 yang telah beroperasi dan memproduksi. Tetapi yang baru mengajukan juga sudah lumayan banyak. Yang lagi proses pengajuan sekarang ini ada sekitar 20-an, saat ini sedang kami proses untuk perizinan pendiriannya," ujar Fuad, dikutip pada Kamis (16/10/2025).

Dengan semakin banyaknya industri rokok yang tumbuh, Fuad memastikan serapan hasil pertanian tembakau dari wilayah Kabupaten Malang tidak mengalami kendala.

Berdasarkan koordinasinya dengan Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura

(DTPHP) Kabupaten Malang, hasil panen tembakau dari petani lokal selalu terserap oleh industri.

"Saya kemarin konfirmasi ke Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Holtikultura, alhamdulillah untuk tembakau di Kabupaten Malang selalu terserap," ungkapnya.

Meski industri terus tumbuh, Fuad mengakui sektor IHT masih menghadapi kendala pada ketersediaan tenaga kerja, terutama tenaga penggiling rokok (SKT). Kebutuhan tenaga kerja di sektor tersebut masih jauh dari mencukupi.

"Kebutuhannya sekitar 6.000 tenaga giling, tetapi sampai sekarang di Kabupaten Malang baru sekitar 1.000-an," bebernya.

Untuk mengatasi kekurangan itu, Disperindag membuka kesempatan bagi pelaku industri agar mengajukan permohonan pelatihan teknis tenaga giling. Pelatihan ini rutin digelar dengan memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), dan ditujukan bagi calon tenaga kerja agar dapat terserap di

industri.

Terpisah, Kepala Bidang Industri Agro Disperindag Kabupaten Malang, Ratna Indriyani, menambahkan hingga akhir 2025, sedikitnya lima industri baru diperkirakan mulai beroperasi setelah menyelesaikan proses perizinan di Bea Cukai.

"IHT inshaallah akan bertambah lagi, masih banyak yang sedang berproses sekarang di Bea Cukai. Sampai dengan akhir tahun 2025 ini, diperkirakan mungkin bisa menambah lima lagi. Jadi sekitar 119 IHT," jelas Ratna.

Ratna juga menyampaikan, produksi rokok di Kabupaten Malang menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Untuk mendukung hal tersebut, Disperindag terus memperkuat



Ilustrasi: Tenaga giling rokok di salah satu industri hasil tembakau (IHT) Kabupaten Malang. (dok. Prokopim Kab Malang)

pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku industri agar seluruh kegiatan produksi berjalan secara legal dan sesuai ketentuan. "Kami juga terus melakukan pembinaan, sosialisasi manajerial, supaya produksi dari IHT ini benar-benar legal," ujarnya. (Santi/Dya)

PASPOR AS TERSINGKIR DARI 10 TERKUAT DUNIA, KINI SETARA MALAYSIA

Untuk pertama kalinya, Amerika Serikat tidak lagi masuk dalam daftar 10 besar paspor terkuat di dunia.

Menurut laporan terbaru Henley Passport Index (HPI) yang dirilis pada Selasa (14/10/2025), paspor AS kini berada di peringkat ke-12 dalam daftar paspor dengan akses perjalanan bebas visa terbanyak di dunia.

Peringkat tersebut sejajar dengan Malaysia, karena kedua negara sama-sama memiliki akses bebas visa ke 180 dari total 227 destinasi di seluruh dunia.

Dikutip dari CNA pada Kamis (16/10/2025), ini menjadi pertama kalinya dalam dua dekade terakhir paspor Amerika Serikat keluar dari daftar 10 besar paspor terkuat versi Henley Passport Index (HPI). Indeks ini menilai kekuatan paspor suatu negara berdasarkan jumlah negara yang dapat dikunjungi pemegangnya tanpa memerlukan visa.

Pada tahun 2014, paspor Amerika Serikat sempat menempati peringkat teratas. Namun, posisi tersebut terus menurun dari tahun ke tahun karena berbagai faktor.

Menurut Henley and Partners, firma yang berfokus pada perencanaan kewarganegaraan dan tempat tinggal, penurunan ini disebabkan oleh minimnya prinsip timbal balik dalam kebijakan visa AS.

Meskipun warga AS dapat bepergian ke 180 negara tanpa visa, hanya 46 negara yang mendapat akses serupa ke Amerika Serikat. Akibatnya, AS hanya berada di peringkat ke-77 dalam Henley Openness Index.

Indeks ini memberi peringkat 199 negara dan wilayah di seluruh dunia berdasarkan jumlah kewarganegaraan yang diizinkan masuk tanpa membutuhkan visa.

"Menurunnya kekuatan paspor AS selama 10 tahun terakhir lebih dari sekadar perombakan peringkat. Ini menandakan pergeseran mendasar dalam mobilitas global dan dinamika soft power," kata Ketua Henley and Partners, Christian Kaelin, seperti dikutip CNA.

"Negara-negara yang menganut keterbukaan dan kerja sama akan maju pesat, sedangkan yang masih mengandalkan privilese di masa lalu akan tertinggal," lanjutnya.

Henley and Partners melaporkan bahwa turunnya peringkat paspor Amerika Serikat ke posisi 12

disebabkan oleh sejumlah perubahan kebijakan akses visa. Salah satunya adalah hilangnya fasilitas bebas visa ke Brasil sejak April akibat kurangnya kebijakan timbal balik.

Selain itu, penerapan sistem e-visa oleh Somalia serta keputusan Vietnam yang tidak memasukkan AS dalam daftar negara penerima perluasan bebas visa turut memperlemah posisi paspor AS.

Penurunan peringkat ini juga dipengaruhi oleh kebijakan Presiden Donald Trump yang memperketat aturan imigrasi dan perjalanan, termasuk bagi pelajar dan tenaga kerja asing. Pemerintah AS juga menambah biaya pemrosesan visa non-imigran sebesar US\$250 (sekitar Rp4 juta) dan mewajibkan wawancara langsung bagi pemohon.

"Bahkan sebelum masa jabatan



Paspor AS di tangan seorang wanita di perlintasan perbatasan San Ysidro di San Ysidro, California. (Foto: Reuters)

kedua Trump sebagai presiden, kebijakan AS telah berorientasi ke dalam negeri," kata analis senior di Center for Strategic and International Studies di Washington, Annie Pforzheimer.

"Pola pikir isolasionis ini kini tercermin dalam hilangnya kekuatan paspor Amerika," lanjutnya.

China mencatat lonjakan besar dalam satu dekade terakhir, naik dari peringkat 94 ke 64 pada 2025 dengan tambahan 37 destinasi bebas visa. Negara itu kini membuka akses bagi 76 negara, 30 lebih banyak dari AS, berkat diplomasi aktifnya dengan negara-negara Teluk, Amerika

Selatan, dan Eropa.

"Kembalinya Trump ke tampuk kuasa telah memicu konflik perdagangan baru yang melemahkan mobilitas Amerika, sementara keterbukaan strategis China meningkatkan pengaruh globalnya," kata Tim Klatte, analis di Grant Thornton China.

Menurut data Henley Passport Index (HPI), Singapura menempati posisi teratas dengan akses bebas visa ke 193 negara. Di urutan kedua ada Korea Selatan dengan 190 tujuan bebas visa, disusul Jepang di peringkat ketiga yang memungkinkan warganya bepergian tanpa visa ke 189 destinasi. (CNA,ist/nei)

Pengadilan Tegaskan Trump Larangan PHK Massal PNS



Presiden AS Donald Trump berbicara di Ruang Oval Gedung Putih di Washington, DC, AS, (11/2/2025). (Foto: Reuters)

HAKIM Distrik Amerika Serikat (AS), Susan Illston, mengabulkan gugatan yang diajukan oleh dua serikat pekerja terkait penolakan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) di lebih dari 30 lembaga federal pada Rabu (15/10/2025).

Dalam keputusannya, hakim memerintahkan Presiden AS, Donald Trump, untuk menghentikan pelaksanaan PHK massal selama masa penutupan sebagian operasi pemerintahan (shutdown).

Dikutip dari Reuters, diketahui Gedung Putih berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di berbagai lembaga federal selama masa shutdown. Presiden Donald Trump juga dilaporkan memperpanjang kebijakan pembekuan perekrutan pegawai baru, kecuali untuk

posisi militer dan pejabat politik.

Saat ini, sekitar 4.100 pegawai dari delapan lembaga federal telah terdampak PHK. Dalam persidangan, Hakim Illston mengabulkan gugatan dua serikat pekerja setelah Direktur Anggaran Gedung Putih, Russell Vought, menyatakan bahwa jumlah PHK bisa melebihi 10.000 pegawai.

Illston juga mencurigai bahwa kebijakan PHK tersebut bermuatan politik, mengingat beberapa lembaga yang terdampak didominasi oleh

pegawai yang berafiliasi dengan Partai Demokrat AS.

"Anda tidak bisa melakukan itu di negara hukum. Dan kami punya hukum di sini, dan hal-hal yang diartikulasikan di sini tidak sesuai hukum," kata Illston, dikutip dari Reuters, Kamis (16/10/2025).

Illston memerintahkan pemerintahan Trump untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban resmi terkait pelaksanaan PHK berdasarkan data aktual, dengan tenggat waktu hingga hari Jumat. Ia juga menuntut langkah konkret dari lembaga-lembaga terkait untuk memastikan keputusan pengadilan dijalankan.

Selama persidangan, Illston menegur keras Elizabeth Hedges, pengacara dari Departemen Kehakiman AS, setelah Hedges berargumen bahwa serikat pekerja seharusnya membawa kasus ini ke Dewan Buruh Federal terlebih dahulu sebelum mengajukannya ke pengadilan. (Reuters,ist/nei)

Belajar dari Kasus Roti 'Gluten Free' Abal-Abal

Makanan dengan label bebas gluten semakin banyak ditawarkan oleh pengusaha kuliner. Para konsumen bersedia membayar lebih mahal demi mengonsumsi makanan berlabel tersebut. Berbagai klaim pun kesehatan pun menyertai makanan berlabel bebas gluten tersebut. Sebenarnya apa makna gluten itu?

Dokter Spesialis Gizi Raissa E. Djuanda menjelaskan makna gluten. Menurutnya, gluten adalah senyawa protein alami yang ditemukan pada biji-bijian tertentu, khususnya gandum, barley (jelai), dan rye (gandum hitam). "Gluten merupakan protein alami yang terdapat pada gandum, barley dan rye (gandum hitam)," kata Raissa E. Djuanda dikutip pada Jumat (16/10/2025). Selain itu, gluten ini pun ada pada roti, pasta dan juga aneka jenis kue seperti cookies dan pastry.

Isu soal gluten itu merebak setelah kasus penipuan makanan roti berlabel 'Bebas Gluten' yang dilakukan sebuah perusahaan makanan. Salah seorang pengguna media sosial menceritakan pengalamannya membeli produk bakery dari toko yang mengklaim menjual produk mereka gluten free, dairy free, dan vegan. Makanan tersebut diberikan kepada anaknya yang berusia 17 bulan itu yang

harus mengikuti diet tersebut atas anjuran dokter.

Raissa E. Djuanda mengatakan sebenarnya gluten berfungsi untuk membuat adonan roti menjadi elastis dan kenyal. "Jadi gluten bukan bahan tambahan, tapi bagian alami dari biji-bijian tertentu," kata Raissa.

Gluten berperan penting dalam memberikan tekstur elastis, kenyal, dan membantu adonan mengembang pada produk makanan berbasis gandum.

Sebenarnya, untuk kebanyakan masyarakat gluten ini tidak menimbulkan masalah kesehatan. "Protein alami ini menjadi bagian dari asupan makanan sehari-hari tanpa menimbulkan dampak negatif pada individu tanpa sensitivitas," katanya.

Risiko Gluten

Walau begitu, gluten dapat menjadi masalah bagi individu dengan kondisi kesehatan tertentu. "Untuk kebanyakan orang sehat, gluten tidak berbahaya. Gluten hanya menjadi masalah pada individu dengan kondisi tertentu, seperti misalnya yang gluten intoleran," kata Raissa E. Djuanda.

Raissa menambahkan kelompok yang sebaiknya menghindari konsumsi gluten adalah orang-orang dengan intoleransi gluten, penyakit autoimun tertentu, dan alergi gandum serta penyakit celiac. Penyakit celiac adalah gangguan autoimun kronis yang memicu sistem kekebalan tubuh menyerang usus halus saat penderita mengonsumsi gluten.

Konsumsi gluten pada individu yang sensitif dapat memicu berbagai gejala,

seperti diare, nyeri perut, kembung, mual, lemas, hingga peradangan usus yang berulang. Sementara itu, jika reaksinya berupa alergi gandum, gejalanya bisa lebih cepat dan berat, meliputi gatal, bengkak, ruam, dan sesak napas. Penyakit celiac dapat didiagnosis melalui serangkaian tes seperti tes darah, tes endoskopi dengan biopsi, tes genetik, atau tes alergi gluten.

Raissa juga mengatakan masyarakat yang memilih untuk menjalani diet bebas gluten, perlu diperhatikan adanya risiko kekurangan nutrisi penting. Hal itu bisa terjadi bila diet tersebut tidak direncanakan dengan baik. "Diet bebas gluten berisiko rendah serat, vitamin B, zat besi, kalsium, dan zinc, yang semuanya penting untuk fungsi tubuh yang optimal," katanya.

Selain itu, berikut adalah manfaat dari makanan gluten free yang dapat mendukung kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup.

Meningkatkan Energi

Penderita penyakit celiac cenderung lebih mudah merasa lelah, lesu, dan kesulitan untuk berkonsentrasi akibat terganggunya penyerapan nutrisi di usus. Kondisi ini menyebabkan tubuh kekurangan energi yang dibutuhkan untuk beraktivitas. Berdasarkan hasil penelitian, lima dari tujuh penderita celiac dilaporkan merasa lebih berenergi setelah rutin mengonsumsi makanan bebas gluten.

Mengurangi Berat Badan

Gluten biasa digunakan dalam proses pembuatan makanan olahan, seperti biskuit, kue, dan

snack lainnya. Mengikuti diet gluten sama saja dengan mengurangi makanan olahan yang biasanya mengandung gula tinggi. Namun, perlu diingat, tidak semua produk gluten free menyehatkan dan mengandung banyak serat. Sebelum membeli, pastikan kamu mengecek label kemasan terlebih dahulu.

Mengurangi Gangguan Pencernaan

Penderita penyakit celiac umumnya mengalami berbagai gejala seperti kembung, diare, perut begah, nyeri perut, mual, dan muntah. Penerapan diet bebas gluten dapat membantu mengurangi gejala-gejala tersebut karena tubuh tidak lagi mengalami reaksi sistem imun terhadap gluten yang dapat merusak usus dan organ pencernaan lainnya.

Mengurangi Toleransi Laktosa

Pengidap penyakit celiac sering kali menunjukkan gejala intoleransi laktosa. Hal ini terjadi karena lapisan usus kecil berperan dalam menghasilkan enzim laktase, yaitu enzim yang berfungsi memecah laktosa yang terdapat pada produk susu. Ketika lapisan usus mengalami gangguan, kemampuan tubuh untuk mencerna laktosa pun menjadi berkurang.

Pada individu dengan intoleransi gluten, kerusakan pada usus dapat menghambat produksi enzim laktase tersebut. Dengan menerapkan pola makan bebas gluten, kesehatan usus secara bertahap dapat membaik, sehingga produksi laktase meningkat dan gejala intoleransi laktosa pun dapat berkurang atau bahkan hilang sepenuhnya.

Meningkatkan Kesehatan Tulang

Penyakit celiac dapat menyebabkan tubuh kekurangan kalsium akibat terganggunya penyerapan nutrisi di usus. Jika kondisi ini tidak ditangani, risiko terjadinya osteoporosis dan osteopenia akan meningkat. Dengan menerapkan pola makan bebas gluten secara konsisten, penyerapan kalsium dapat membaik sehingga membantu mencegah kekurangan mineral tersebut dan menjaga kesehatan tulang secara keseluruhan. Selain itu, pola makan ini juga berperan penting dalam memperbaiki fungsi usus, menstabilkan metabolisme tubuh, serta mendukung proses regenerasi jaringan tulang agar tetap kuat dan sehat dalam jangka panjang.(nei,ist/dya)



Karbondioksida di Atmosfer Tembus Level Tertinggi, Apa Efeknya?

Kadar karbon dioksida (CO₂) di atmosfer bumi mengalami peningkatan tertinggi dalam sejarah, serupa dengan rekor yang pernah terjadi pada tahun 2024. Kenaikan ini mencapai level baru yang berpotensi memicu peningkatan suhu jangka panjang di seluruh planet.

Temuan tersebut tercantum dalam laporan yang dirilis oleh Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) pada Rabu (15/10). Dalam Buletin Gas Rumah Kaca-nya, WMO menjelaskan bahwa lonjakan ini disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor, antara lain emisi berkelanjutan dari aktivitas manusia, meningkatnya hasil emisi dari kebakaran hutan, serta menurunnya kemampuan ekosistem darat dan laut sebagai "penyerap" alami karbon. Gabungan faktor-faktor tersebut dinilai dapat menciptakan siklus iklim yang berbahaya bagi bumi.

Selama periode 2023 hingga 2024, konsentrasi rata-rata karbon dioksida (CO₂) secara global meningkat sebesar 3,5 parts per million (ppm). Kenaikan tersebut tercatat sebagai peningkatan tahunan tertinggi sejak dimulainya pengukuran modern pada tahun 1957.

"Panas yang terperangkap oleh CO₂ dan gas rumah kaca lainnya mempercepat iklim kita dan menyebabkan cuaca yang lebih ekstrem," kata Wakil Sekretaris Jenderal WMO, Ko Barrett, seperti dilansir Anadolu.

"Oleh karena itu, mengurangi emisi sangat penting bukan hanya untuk iklim kita, tetapi juga untuk keamanan ekonomi dan kesejahteraan komunitas kita," imbuhnya.

Laju peningkatan karbon dioksida telah naik hingga tiga kali lipat sejak dekade 1960-an, yaitu dari rata-rata kenaikan tahunan sebesar 0,8 ppm menjadi 2,4 ppm pada periode 2011 hingga 2020.

Pada tahun 2024, konsentrasi rata-rata karbon dioksida global mencapai 423,9 ppm, meningkat dibandingkan 377,1 ppm ketika buletin pertama kali diterbitkan pada tahun 2004.

Efeknya

Menurut laporan WMO, rekor peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh emisi yang berasal dari kebakaran hutan serta menurunnya kemampuan sistem darat dan laut dalam menyerap karbon sepanjang tahun 2024. Tahun tersebut tercatat sebagai tahun terpanas yang pernah terjadi, diperparah oleh kuatnya fenomena El Nino yang memicu kekeringan ekstrem dan kebakaran besar di wilayah Amazon serta Afrika bagian selatan.

"Ada kekhawatiran bahwa penyerap CO₂ terestrial dan laut menjadi kurang efektif, yang akan meningkatkan jumlah CO₂ yang tersisa di atmosfer, sehingga mempercepat pemanasan global," kata Oksana Tarasova, petugas ilmiah senior di WMO. "Pemantauan gas rumah kaca yang berkelanjutan dan diperkuat sangat penting untuk memahami perulangan ini," sambungnya.

Dua gas rumah kaca jangka panjang lain yang paling berpengaruh setelah karbon dioksida, yaitu metana dan dinitrogen oksida, juga

mencatatkan tingkat konsentrasi tertinggi pada tahun 2024.

Konsentrasi metana meningkat hingga 1.942 parts per billion (ppb) atau 166% lebih tinggi dibandingkan masa pra-industri, sedangkan dinitrogen oksida naik menjadi 338,0 ppb, sekitar 25% lebih tinggi dibandingkan sebelum tahun 1750.

WMO menyebutkan bahwa temuan ini dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan ilmiah menjelang Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30) yang akan diselenggarakan di Belem, Brasil, pada November 2025, di mana para negara diharapkan dapat mempercepat langkah dalam menekan emisi gas rumah kaca. (nei,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH I **LAMONGAN:** L HANDI I **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA I **KEDIRI:** GATOT SUNARKO I **JOMBANG :** SUTONO I **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO I **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO I **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN I **TRENGGALEK:** TINA W I **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN I **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN I **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN I **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 I **TELP** 03187854491 I **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I **TELP IKLAN** 031-87854491 I **NIB** 91205006801134 I **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Belitung

Surga Kepulauan dengan Wisata Memukau

Belitung merupakan sebuah kabupaten dengan ibu kota di Tanjung Pandan. Selain terkenal sebagai lokasi syuting film Laskar Pelangi, Belitung memiliki banyak tempat wisata menarik yang layak dikunjungi. Kabupaten ini berbentuk kepulauan dan terletak di antara Laut Natuna serta Laut China Selatan, menjadikannya wilayah dengan panorama alam yang memukau serta potensi wisata bahari yang melimpah.

Keindahan alam Belitung terlihat dari hamparan pantai berpasir putih, air laut yang jernih, dan bebatuan granit raksasa yang menjadi ciri khasnya. Pulau-pulau kecil di sekitarnya pun menawarkan pengalaman wisata yang beragam, mulai dari aktivitas snorkeling, menyelam, hingga berlayar menikmati keindahan laut tropis.

Tidak hanya pantai dan pulau, Belitung juga memiliki berbagai destinasi wisata lainnya seperti danau, hutan lindung, hingga kawasan ekowisata yang memadukan keindahan alam dan pelestarian lingkungan. Keunikan budaya masyarakat lokal serta keramahan penduduknya turut menambah daya tarik, menjadikan Belitung sebagai pilihan tepat untuk berlibur, berpetualang, sekaligus menikmati ketenangan alam.

Pantai Laskar Pelangi

Siapa yang tidak mengenal judul film Laskar Pelangi, yang diangkat dari novel best seller karya Andrea Hirata. Kisahnya telah menginspirasi banyak pecinta film untuk mengunjungi

langsung lokasi syuting yang memiliki keindahan luar biasa.

Lokasi tersebut memang terkenal sebagai tempat syuting dengan latar belakang batuan granit alami yang menjulang tinggi. Keasrian lingkungan sekitar serta warna biru laut yang menawan menjadikannya semakin menarik untuk dikunjungi. Pasir pantai yang putih dan halus juga menjadikan kawasan ini sebagai tempat yang tepat untuk bersantai dan melepas penat.

Pulau Batu Berlayar

Tempat wisata di Belitung yang tidak kalah menarik dan berkesan adalah Pulau Batu Berlayar. Pulau ini merupakan salah satu pantai yang terpencil dan indah, sehingga menjadi destinasi ideal bagi siapa saja yang ingin bersantai dan menjauh dari keramaian. Lingkungan yang masih alami dan asri sangat cocok bagi wisatawan yang ingin sejenak melepaskan diri dari kesibukan kota.

Batuan granit di pulau ini memiliki bentuk yang menyerupai layar perahu, menjadi ciri khas yang ikonik. Dengan menggunakan perahu sederhana milik nelayan, pengunjung sudah dapat mencapai pulau yang menawan ini.

Danau Kaolin

Danau Kaolin merupakan salah satu destinasi wisata di Belitung yang sangat cocok bagi para penggemar fotografi. Lokasi ini memiliki daya tarik unik yang tidak dimiliki oleh tempat wisata lain. Danau ini sebelumnya merupakan bekas tambang, namun

kini telah dikenal sebagai objek wisata populer yang mudah ditemukan dalam paket wisata di wilayah Belitung.

Meskipun merupakan bekas tambang, udara di sekitar danau tetap segar dan bebas dari bau belerang. Keunikan lainnya terlihat pada warna air yang biru serta pemandangan bukit putih di sekitarnya yang menawan. Selain itu, terdapat sisi danau lain yang tidak kalah menarik untuk dijelajahi dan dinikmati keindahannya.

Pulau Lengkuas

Jangan lupa mengunjungi Pulau Lengkuas sebagai salah satu destinasi wisata di Belitung. Pulau ini tidak hanya menawarkan keindahan alam dan suasana yang menenangkan, tetapi juga menyimpan nilai sejarah yang menarik.

Di pulau ini terdapat bangunan mercusuar yang telah berdiri sejak tahun 1882, sehingga Pulau Lengkuas juga dikenal sebagai Pulau Lighthouse. Wisatawan yang berkesempatan dapat menaiki mercusuar untuk menikmati pemandangan Belitung dari ketinggian, lengkap dengan hamparan laut biru dan pasir putih yang memukau.

Pantai Tanjung Tinggi

Belitung dikenal luas dengan pantainya yang indah, eksotis, dan masih alami. Bagi wisatawan yang merasa jenuh dengan kesibukan dan hiruk-pikuk perkotaan, ketenangan dan kenyamanan yang ditawarkan Pantai Tanjung Tinggi sangat cocok untuk dijadikan destinasi wisata.

Pantai ini merupakan salah satu yang paling terkenal bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Di kawasan pantai, terdapat batuan granit besar yang tersusun rapi, memberikan pemandangan khas yang menciptakan kesan tersendiri dan tak terlupakan bagi setiap pengunjung Pantai Tanjung Tinggi.

Batu Mentas

Batu Mentas merupakan salah satu destinasi wisata di Belitung yang sangat cocok bagi keluarga yang menyukai wisata alam. Terletak di kawasan Hutan Lindung Wisata Alam Gunung Tajam, tempat ini menawarkan udara segar serta suasana hutan yang masih asri, menjadikannya pilihan tepat untuk bersantai dan menikmati keindahan alam.

Selain berfungsi sebagai objek wisata alam, Batu Mentas juga merupakan kawasan konservasi bagi tarsius, hewan endemik Belitung yang tergolong langka. Di lokasi ini, pengunjung dapat memanfaatkan berbagai fasilitas ekowisata, termasuk area camping dan wahana outbound, sehingga pengalaman berkunjung menjadi lebih lengkap dan menyenangkan.

emosional maupun fisik. Hubungan toksik ditandai dengan adanya manipulasi, kontrol berlebihan, kurangnya rasa hormat, hingga kekerasan verbal atau emosional. Hubungan semacam ini dapat membuat seseorang kehilangan harga diri dan merasa terjebak dalam pola yang tidak sehat.. (nei,ist/dya)

Batu Berlayar

Danau Kaolin

Pulau Lengkuas

Batu Mentas

Jurus Pemerintah Jadikan ...dari hal 1

Berbagai kebijakan sebenarnya telah ditempuh pemerintah untuk meningkatkan perekonomian para petani, mulai dari program subsidi pupuk, harga gabah, memperluas mekanisasi, dan memperkuat dukungan bagi petani telah mendorong peningkatan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Terkait dengan pupuk, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, untuk melakukan langkah besar dalam memperkuat sektor pupuk nasional. Dalam rapat terbatas di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025), Prabowo menegaskan perlunya revitalisasi pabrik-pabrik pupuk di seluruh Indonesia agar proses produksi menjadi lebih efisien dan harga pupuk di tingkat petani bisa ditekan.

Menurut Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, arahan presiden difokuskan pada peningkatan efisiensi industri pupuk guna memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pupuk bagi petani.

"Presiden meminta Menteri Pertanian mencari terobosan agar ketersediaan pupuk aman dan pabrik-pabrik yang ada bisa direvitalisasi. Harapannya, produksi menjadi lebih efisien dan harga bisa turun sehingga meringankan beban petani," ujar Prasetyo dalam keterangan resmi.

Selain efisiensi, Prabowo juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pupuk lokal untuk mendukung produktivitas pertanian nasional dan memperkuat ketahanan pangan Indonesia.

Saat ini, PT Pupuk Indonesia (Persero) telah menyiapkan stok pupuk bersubsidi sebanyak 1.200.679 ton untuk musim tanam Oktober-Maret (Okmar) 2025/2026. Jumlah itu setara dengan 259% dari batas minimum stok pemerintah. Berdasarkan data per 30 September 2025, persediaan pupuk nasional terdiri atas 510.262 ton Urea, 610.649 ton NPK, 14.316 ton NPK formula khusus, 8.759 ton ZA, serta 56.693 ton pupuk organik.

Selain pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia juga menyediakan 480.364 ton pupuk nonsubsidi, dengan rincian 412.212 ton Urea, 27.411 ton NPK, dan 40.740 ton ZA, yang telah tersebar di gudang-gudang produsen hingga penyangga di tingkat kabupaten dan kota.

Langkah revitalisasi yang diperintahkan Prabowo ini diyakini akan menjadi titik balik industri pupuk nasional, mengingat kebutuhan pupuk terus meningkat sementara sebagian fasilitas produksi telah beroperasi di bawah kapasitas

optimal.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan pemerintah kini memangkas 144 aturan rumit dalam penyaluran pupuk menjadi hanya tiga langkah sederhana. Pemangkasan dilakukan sebagai bagian dari percepatan reformasi sistem pangan nasional.

"Dulu untuk terima pupuk, petani itu harus mengikuti 144 aturan. Maka pupuk itu sampai pada waktu panen. Ini kita pangkas. Dari 144 langkah cuma tinggal tiga: Kementan, pupuk, sampai petani. Jadi sebelum tanam pupuk sudah ada. Itu meningkat," ujar Zulhas dalam Agri Food Summit 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025) yang digelar dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia pada 16 Oktober ini.

Zulhas menjelaskan penyederhanaan proses ini bisa dilakukan karena adanya dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto dengan instruksi presiden (inpres) dan keputusan presiden (keppres) yang mempercepat jalur birokrasi.

Menurut Zulhas, birokrasi yang panjang menjadi salah satu hambatan terbesar dalam reformasi pertanian. Ia mencontohkan proses pengembangan lahan baru yang biasanya memakan waktu hingga 10 tahun kini bisa diselesaikan hanya dalam tiga bulan setelah keluarnya Keppres Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional dan Keppres Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional.

"Saya bersyukur karena 13 bulan enggak selesai, tapi setelah ada Keppres 14 dan 19, tiga minggu kelar. Ini kerjaan 10 tahun," ungkapnya.

Selain program pupuk bersubsidi, pemerintah juga melakukan perubahan kebijakan harga gabah. Zulhas mengatakan perubahan ini telah membawa dampak besar bagi kesejahteraan petani. Jika dulu petani hidup miskin dan terpaksa bertani karena tidak ada pilihan lain, kini mereka bisa meraup keuntungan hingga Rp70 juta per hektare per tahun.

"Nah sekarang soal harga, coba kita lihat. Karena begini, ada sesuatu yang mendasari yang kita ubah. Kita diskusi ke Pak Presiden pada waktu itu mengenai harga," ujar Zulhas.

Zulhas pun menceritakan, pada masa awal ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan, harga gabah di tingkat petani masih terlalu rendah. "Di dalam rumus harga itu, harga gabah itu setinggi-tingginya waktu itu belum Rp5.000 per kg, setinggi-tingginya Rp4.450 gabah, setinggi-tingginya. Udah gak mungkin petani bisa produktif, miskin iya. Yang akan terjadi, pertanian itu terpaksa, tanam

padi itu terpaksa, karena gak ada pilihan," katanya.

Kondisi itu, lanjut Zulhas, membuat banyak petani kehilangan semangat, bahkan menjual lahannya karena terus merugi. "Dan lama-kelamaan kena rugi-rugi, nggak mau menyekolahkan anaknya, lahannya hilang, dijual," tutur dia.

Melihat situasi itu, Zulhas mengusulkan agar kebijakan harga gabah diubah. "Saya mengatakan, kalau setinggi-tingginya Rp4.450 (per kg), berarti kalau berlebih Bulog beli, masuk penjara. Maka waktu itu saya usulkan diubah. Buat pemerintah membeli gabah serendah-rendahnya, bukan setinggi-tingginya, serendah-rendahnya pada waktu itu Rp4.450," ujarnya dilansir cncbindonesia.

Usulan itu kemudian direspons Presiden Prabowo Subianto dengan menaikkan harga gabah. "Tapi sekarang, inpres (Instruksi Presiden) dari presiden, harga gabah Rp6.500 per kg," terang dia.

Dengan kebijakan baru tersebut, pendapatan petani meningkat signifikan. "Jadi 1 hektare, kalau dia 2 kali panen saja, maka petani bisa menghasilkan kira-kira Rp70 juta rupiah, 1 hektare, 1 tahun. Dan begitu dia bisa menyekolahkan anaknya, dia bisa kreatif, dia bisa lebih produktif. Itulah seperti petani-petani di Thailand, petani-petani di Vietnam," kata Zulhas.

Menurutnya, peningkatan ini juga tercermin dari data nilai tukar petani (NTP) yang melonjak tajam. "Dan data menunjukkan, nilai tukar petani, khusus untuk gabah dan jagung, 2024 itu 101, artinya miskin itu. Itu gak mampu bayar uang sekolah anak itu. Tapi sekarang 2025, (NTP-nya) 124," ujarnya.

Selain dua hal tadi, pemerintah juga berusaha memperluas mekanisasi yaitu penggunaan alat dan teknologi untuk pertanian. Penerapan teknologi pada sektor pangan dinilai sangat penting. Selain dapat meningkatkan produktivitas, pemanfaatan teknologi sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas hasil panen.

Mentan, Andi Amran Sulaiman, menegaskan Kementan melakukan peningkatan mekanisasi pertanian dan modernisasi di lapangan. Distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan) terus diperluas, sehingga petani kini semakin terbantu dalam proses tanam maupun panen.

"Sekarang di banyak wilayah, petani sudah tidak lagi kesulitan tenaga kerja, karena semua sudah dibantu dengan traktor dan alsintan modern. Mekanisasi ini betul-betul terasa manfaatnya di lapangan," tambah Amran.

Ia menilai, percepatan transformasi pertanian modern menjadi salah satu kunci untuk menjaga daya saing dan ketahanan pangan nasional. Pemerintah terus

mendorong agar setiap kebijakan pertanian memiliki dampak langsung terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang pangan, Prayudi Syamsuri mengungkap bahwa pihaknya sedang mereview regulasi-regulasi yang dapat membatasi penggunaan teknologi untuk pertanian, khususnya terkait benih hasil rekayasa.

Langkah ini penting dilakukan agar Indonesia tidak tertinggal dari negara-negara lain khususnya dalam mendorong swasembada pangan. "Jadi kalau kita berbicara regulasi, memang hadir untuk mengatur sebenarnya. Kita telah memiliki PP21 tahun 2005, terkait dengan keamanan hayati produk rekayasa genetika. Kemudian ada turunan perpres, kemudian dari keamanan-keamanan teknis juga sudah ada. Tinggal bagaimana kita coba dengan kabinet yang baru ini, kita coba melakukan review terhadap regulasi-regulasi mana yang kita coba bisa percepat," ujarnya, Kamis (16/10/2025).

Apalagi Prayudi menilai bahwa penggunaan teknologi sudah menjadi sebuah tuntutan. Sehingga pihaknya juga ikut mendorong agar Indonesia tidak menjadi pasar bagi negara lain, karena sudah lebih maju industri pertaniannya.

Melihat hal itu Kementerian Koordinator Pangan saat ini sedang menyiapkan tim pokja perbenihan. Nantinya tim ini yang akan melakukan review terhadap regulasi-regulasi itu. "Karena ini sudah tuntutan sebenarnya. Tuntutan kita untuk memanfaatkan teknologi. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan teknologi, kita ketinggalan. Bahkan kita akan menjadi pasar nanti," jelasnya.

Bahkan Agriculture Affairs & LTO Lead, Bayer Crop Science Indonesia, Aditia Rusmawan, menuturkan penerapan teknologi dinilai sebuah keharusan. Ia mengatakan, pihaknya telah mengembangkan bioteknologi pada jagung sehingga tahan terhadap gulma. Seperti diketahui, gulma merupakan tumbuhan liar yang bersaing dengan jagung untuk mendapatkan unsur hara, air, dan cahaya, dan dapat menurunkan hasil panen. Dengan bioteknologi ini maka bisa meningkatkan produksi petani jagung 15 hingga 25%.

Terkait dengan kebijakan pertanian di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, sejumlah pengamat dan peneliti menyebut telah mendorong peningkatan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Pengamat dari Universitas Andalas, Dr. Muhammad Maki, menyampaikan bahwa arah kebijakan pertanian pemerintah saat ini telah memberikan ketenangan dan rasa percaya diri baru bagi petani. (han,day,ist/lut)



PERKUAT EKONOMI DAERAH, DPRD JATIM DUKUNG TRANSFORMASI BUMD LEWAT REVISI PERDA



Juru Bicara Komisi C DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menyerahkan hasil pembahasan komisi tentang perubahan Perda nomor 8 tahun 2019. (dok humas)

SURABAYA – Dalam momentum perubahan ekonomi nasional yang terus berkembang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur mendukung transformasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lewat revisi Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang BUMD. Langkah tersebut sebagai upaya memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai motor penggerak ekonomi daerah,

Hal ini tercermin dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang BUMD yang dibahas secara intensif dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Kamis (16/10/2025).

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni, dalam pidatonya menyampaikan bahwa transformasi BUMD bukan hanya kebutuhan struktural, melainkan sebuah keniscayaan di tengah arus perubahan ekonomi nasional. Ia menekankan bahwa keberadaan BUMD memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

“BUMD memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), serta memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan usaha yang berorientasi pada kemanfaatan umum,” ungkap Sri Wahyuni.

Namun demikian, Sri Wahyuni

menilai bahwa regulasi yang selama ini mengatur BUMD melalui Perda Nomor 8 Tahun 2019 sudah mulai kehilangan relevansi seiring dengan dinamika dunia usaha, perkembangan regulasi nasional, serta semakin tingginya tuntutan terhadap penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

“Diperlukan adanya penyesuaian terhadap ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah tersebut agar tetap adaptif dan mampu menjawab kebutuhan tata kelola BUMD yang profesional dan akuntabel,” jelasnya.

Perubahan dalam Raperda ini meliputi penyesuaian terhadap perkembangan regulasi dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), serta memperjelas mekanisme penyertaan modal, pembentukan anak perusahaan, dan pelaporan.

Lebih lanjut, Juru Bicara Komisi C DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, menuturkan proses seleksi calon anggota Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD yang selama ini hanya dilakukan oleh panitia seleksi di bawah eksekutif dinilai belum sepenuhnya menjamin transparansi dan akuntabilitas.

“Ketentuan tersebut perlu diperkuat untuk menjamin keterlibatan DPRD dalam proses seleksi, sebagai bentuk pengawasan politik terhadap representasi kekayaan daerah yang dipisahkan dalam bentuk BUMD,” ujar Lilik.

Untuk itu, perubahan penting yang diajukan dalam Pasal 19, yakni

penambahan ayat (4a), memberikan legitimasi kepada DPRD untuk melakukan fungsi pengawasan langsung dalam proses seleksi calon anggota Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD. Hal ini menjadi langkah strategis dalam menciptakan proses seleksi yang terbuka, berbasis kompetensi, dan berorientasi pada integritas.

Tak hanya itu, perubahan ayat (7) juga memperkuat peran DPRD dengan mewajibkan hasil uji kelayakan dan kepatutan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada DPRD.

Langkah ini memberi ruang informasi dan kontrol yang lebih luas bagi legislatif dalam mengawasi arah kepemimpinan BUMD ke depan.

Lilik menegaskan bahwa penguatan peran DPRD bukan untuk mengintervensi kewenangan eksekutif, tetapi sebagai bentuk checks and balances yang sehat dalam tata kelola pemerintahan daerah.

“Peran DPRD yang diformalkan dalam ayat (4a) tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan eksekutif, tetapi untuk memastikan bahwa proses seleksi berjalan sesuai prosedur dan menghasilkan pimpinan BUMD yang berintegritas serta kompeten dalam mengelola aset dan investasi daerah,” pungkasnya.

Terkait dengan penyertaan modal, maka Perubahan Pasal 8 menegaskan bahwa penyertaan modal harus memiliki arah dan dasar yang jelas, didukung rencana bisnis, dan wajib

dilaporkan kepada DPRD.

Kemudian, perubahan Pasal 10, memberikan penambahan ketentuan terkait pembentukan anak perusahaan, termasuk tanggung jawab holding terhadap kerugian dan kewajiban laporan tahunan konsolidasi kepada DPRD.

Pasal 22 juga diubah secara signifikan dengan memperluas penggunaan laba bersih BUMD untuk tantiem, bonus pegawai, serta program CSR yang diprioritaskan pada UMKM.

Selain itu, ditambahkan lima pasal baru (Pasal 22A–22E) yang memperkuat aspek kepegawaian, kerja sama, pelaporan, evaluasi kinerja, dan sanksi manajerial terhadap Direksi yang tidak mencapai target.

Perubahan penting juga dilakukan terhadap Pasal 13 yang berkaitan dengan penugasan dari Pemerintah Provinsi kepada BUMD. Anggota Komisi C DPRD Jatim, Guntur Wahono, menyampaikan bahwa selama ini ketentuan dalam Pasal 13 memang sudah mengatur mengenai penugasan BUMD untuk mendukung perekonomian dan kemanfaatan umum.

Namun dalam praktiknya, masih banyak aspek teknis yang belum jelas dan seringkali menimbulkan kebingungan dalam implementasi di lapangan.

“Dalam implementasinya, diperlukan penguatan norma untuk memberikan kejelasan mengenai ruang lingkup penugasan, mekanisme pelaksanaan, serta batas waktu dan bentuk dukungan pendanaan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Provinsi,” ujar Guntur.

Hal ini sangat penting untuk menjamin bahwa penugasan BUMD tidak sekadar menjadi beban, melainkan dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang matang dan dukungan yang jelas dari pemerintah daerah.

Tujuannya agar setiap penugasan bisa memberikan dampak ekonomi dan sosial yang terukur, tidak hanya secara finansial tetapi juga dalam pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (adv,pra/lut)